

Humanistika: Jurnal Keislaman

Vol. 8 No. 1 2021. ISSN (Print): [2460-5417](https://doi.org/10.36835/humanistika.v8i1.728) ISSN (Online): [2548-4400](https://doi.org/10.36835/humanistika.v8i1.728)

DOI: <https://doi.org/10.36835/humanistika.v8i1.728>

**OTOKRASI BRUNEI DARUSSLAM:
AKTUALISASI RELIGIUSITAS ISLAM MELALUI LEGITIMASI
POLITIK MASA KINI**

Durrotul Dea Mahmuda

UIN Sunan Ampel Surabaya

e04219004@student.uinsby.ac.id

Rusli Baharudin

UIN Sunan Ampel Surabaya

e94219029@student.uinsby.ac.id

Syafiatul Umma

UIN Sunan Ampel Surabaya

e94219030@student.uinsby.ac.id

Abstract

This paper discusses the actualization of Brunei's religiosity through existing political legitimacy and is carried out through a centralized autocratic government. Islamic religiosity in Brunei is formed and exists today due to various factors, both social, political, cultural, historical and religious practices there which are strengthened by the sultan's political legitimacy based on Islamic teachings. Brunei's religiosity is very prominent because Brunei's constitution makes Islam the official religion and makes MIB (Melayu Islam Beraja) the main philosophy of the country with a system of government established by Sultan Hassanal Bolkiah, both from a social and political perspective. This paper also contains the author's analyzes related to the importance of Islam's position in inspiring the running of Brunei's autocratic government which is relevant to this day. In its implementation, Brunei applies a political system that runs in an absolute monarchy where the power and decisions of the leader or sultan become the head of state, head of government and the highest leader in the field of religion, so that

<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/humanistika>

Durrotul Dea Mahmuda
Rusli Baharuddin
Syafiatul Umma

executive power is controlled authoritatively by the sultan. And there is an analysis related to the Brunei government as well as about the concept of leadership and the political system there, through the main concepts recommended by the Quran for the science of government, namely the concept of balance, the concept of responsibility and the concept of leadership.

Keywords: Brunei Autocracy, Religiosity, Political Legitimacy

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang aktualisasi religiusitas Brunei melalui legitimasi politik yang ada dan dijalankan melalui jalan pemerintahan otokrasi yang sentralistik. Religiusitas islam di Brunei terbentuk dan eksis hingga saat ini dikarenakan beragam faktor baik, sosial, politik, budaya, sejarah serta praktik keagamaan disana yang diperkuat dengan legitimasi politik sultan yang berdasarkan ajaran islam. Religiusitas Brunei menjadi sangat menonjol karena konstitusi Brunei menjadikan islam sebagai agama resmi dan menjadikan MIB (Melayu Islam Beraja) sebagai falsafah utama negara dengan sistem pemerintahan yang dibentuk oleh Sultan Hassanal Bolkiah, baik dari segi sosial ataupun politiknya. Tulisan ini juga memuat analisis-analisis penulis terkait dengan pentingnya posisi islam dalam mengilhami berjalanya pemerintahan otokrasi Brunei yang relevan hingga sekarang. Dalam implementasinya Brunei menerapkan Sistem politik yang berjalan secara monarki absolut dimana kekuasaan dan keputusan pemimpin atau sultan menjadi kepala negara, kepala pemerintahan dan pemimpin tertinggi bidang agama, sehingga kekuasaan eksekutif dikuasai secara otoritatif oleh sultan. Dan terdapat analisis terkait pemerintahan Brunei serta mengenai konsep kepemimpinan dan sistem Politik disana, melalui konsep utama yang dianjurkan Al Quran terhadap ilmu pemerintahan yaitu konsep keseimbangan, konsep pertanggungjawaban dan konsep kepemimpinan.

Kata Kunci : Otokrasi Brunei, Religiusitas, Legitimasi Politik

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas tentang aktualisasi religiusitas Brunei melalui legitimasi politik yang ada dan dijalankan melalui jalan pemerintahan otokrasi yang sentralistik. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dan menurut data dari World Factbook tahun 2013 merupakan negara yang menempati urutan ke-148 di dunia setelah Siprus dan sebelum Trinidad sebagai negara-negara yang masuk dalam kategori negara yang memiliki luas wilayah tergolong kecil. Secara geografis negara Brunei Darussalam terletak di pantai barat-laut pulau Kalimantan, dan berbatasan dengan Serawak di sebelah barat daya, Sabah di sebelah timur laut, sedangkan di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan negara Indonesia.

Dilihat dari status sosial ekonomi masyarakatnya, Brunei merupakan negara kaya berkat sumber daya alamnya seperti minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya pembangunan berbagai fasilitas publik terus digalakkan demi memanjakan rakyatnya. Fasilitas umum seperti telpon air, listrik, angkutan umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain semuanya berada dalam tanggungan pemerintah atau gratis. Kebijakan- kebijakan pemerintah mengenai hukum, ketertiban, kesejahteraan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi mendominasi kehidupan rakyat. Proses sosial ini menjadikan penduduk Brunei mampu memiliki pola hidup yang toleran, harmonis, dan hidup bersama.

Otokrasi Brunei Darussalam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Brunei adalah orang yang paling kuat karena ia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan. Dia menunjuk dan memberhentikan menterinya. Rakyat Brunei memberikan penghormatan kepada sultan mereka di tingkat tertinggi karena mereka memperlakukan kata-kata Yang Mulia sebagai dekrit. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak atau mempertanyakan kata-kata Sultan karena itu bisa menjadi alasan untuk pengkhianatan.

Dalam aspek penerapan Syariah Islam Brunei Darussalam telah menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengadopsi Hukum Syariah. Sultan pertama kali mengumumkan rencana untuk penerapan Syariah Islam pada pertengahan 1990-an, ketika itu beberapa komite ditugaskan untuk menyusun hukum. Upaya ini pada awalnya ditentang oleh beberapa orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan dan keluarga kerajaan namun akhirnya tetap disetujui.¹ Dalam tulisan ini akan menganalisis terkait pemerintahan Brunei serta mengenai konsep kepemimpinan dan sistem Politik disana, melalui konsep utama yang dianjurkan Al Quran terhadap

¹ Müller, D. M. (2016). Brunei in 2015: oil revenues down, sharia on the rise. *Asian Survey*, 56(1), 165-166

ilmu pemerintahan yaitu konsep keseimbangan, konsep pertanggungjawaban dan konsep kepemimpinan.

Sejarah Berdirinya Brunei dan Kekuasaan Monarki

Pada zaman dulu Negara Brunei disebut sebagai Kerajaan Borneo yang kemudian berubah nama menjadi Brunei. Ada juga yang berpendapat Brunei berasal dari kata "baru nah" yang dalam sejarah dikatakan bahwa pada rombongan suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai yang pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang melimpah di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan baru nah yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian perkataan baru nah itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei.²

Kerajaan Brunei telah ada setidaknya sejak abad ke-7 atau ke-8 M. Kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad ke-9 dan kemudian dijajah lagi oleh Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Brunei berdiri sendiri, dan bahkan Kerajaan Brunei mencapai masa kejayaannya dari abad ke-15

² Lihat, "Brunei Darussalam," http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam.

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

sampai ke-17.³ Kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Dalam Sejarahnya Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M. Baginda Sultan dinasehati oleh beberapa majelis dalam sebuah kabinet menteri, walaupun baginda sebenarnya merupakan pengendali pemerintahan tertinggi. ⁴ Lebih tepatnya Kesultanan Brunei Darussalam berdiri sekitar tahun 1402 M dengan dipimpin oleh raja atau sultan yang telah menduduki hingga sekarang.

Adapun berikut Sultan Brunei yang telah memerintah sejak resmi didirikannya dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan adalah Sultan Muhammad Shah (1383-1402); Sultan Ahmad (1408-1425); Sultan Syarif Ali (1425-1432); Sultan Sulaiman (1432-1485); Sultan Bolkiah (1485-1524); Sultan Abdul Kahar (1524-1530); Sultan Saiful Rizal (1533-1581); Sultan Shah Brunei (1581-1582); Sultan Muhammad Hasan (1582-1598); Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598-1659); Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1669-1660); Sultan Haji Muhammad Ali (1660-1661); Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661-1673); Sultan Muhyiddin (1673-1690); Sultan Nasruddin (1690-1710); Sultan Husin Kamaluddin (1710-1730 & 1737-1740); Sultan Muhammad Alauddin (1730-1737); Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795); Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807); Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804); (21) Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826); Sultan Muhammad Alam (1826-1828); Sultan Omar Ali

³ Ibid.

⁴ Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015. Hal 53.

Saifuddin II (1828-1852); Sultan Abdul Momin (1852-1885); Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906); Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924); Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950); Sultan Omar 'Ali Saifuddin III (1950-1967); Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-sekarang).⁵

Terkait dengan Sejarah Masuknya Islam di Brunei dapat dilihat berdasarkan bukti sejarah Brunei, berupa batu nisan Cina muslim di Rongas. Islam semakin berkembang di kawasan Brunei Darussalam dan Islam menjadi agama resmi negara sejak Muhammad Shah memeluk Islam dan memerintah di Kerajaan Brunei Darussalam (1406-1408).⁶ Islam semakin berkembang terutama semenjak Malaka sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam, jatuh ke tangan Portugal (1511) yang menyebabkan banyak ahli dalam bidang agama pindah ke Brunei Darussalam dan perkembangan Islam semakin nyata lagi.

Begitu juga perkembangan islam pada masa Sultan Hassan (Sultan ke-9) beliau melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut tata pemerintahan: 1) menyusun institusi pemerintahan agama karena agama memainkan peranan penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan rakyat; 2) menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara, baik

⁵ Elisseeff, Vadime (January 2000). "*Chapter 8: A Brunei Sultan of the Early Fourteenth Century – A Study of an Arabic Gravestone*". *The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce*. Berghahn Books. pp. 145–157.

⁶ Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015. Hal 60.

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

suka maupun duka di samping menciptakan atribut kebesaran dan perhiasan raja; 3) menguatkan undang-undang Islam, yaitu Hukum Qanun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagian.⁷

Setelah masa Keemasan Brunei tersebut, datanglah Eropa menakhlukan Brunei Darussalam pada tahun 1888-1983. Pada saat itu Malaysia memproklamirkan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957, dan waktu itu Brunei masih dinyatakan gabung dengan Malaysia. khususnya pada tahun 1960 yang mengakibatkan ketidakstabilan kedua negara tersebut yang masih menjadi satu negara Malaysia. Dimana kemudian kedua negara tersebut saling berusaha keras mengamankan negaranya yang mayoritas ber etnis melayu. Dan pada akhirnya Brunei memisahkan diri dari Malaysia ketika kondisi sudah benar-benar aman. Brunei memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983 dan Inggris angkat kaki dari Brunei pada tanggal 1 Januari 1984.

Setelah merdeka Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja.⁸ Setelah Brunei merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkiah Mu'izaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai

⁷ Ibid.

⁸ Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015. Hal 8-9

pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati. Kerajaan Brunei dalam konstitusinya secara tegas menyatakan bahwa beraliran Sunni (Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah).⁹ Perkembangan Islam di negara Brunei didukung sepenuhnya oleh pihak pemerintah kesultanan yang menerapkan konsep kepemimpinan Sunni yang ideal.

Dalam perkembangannya sejak akhir abad ke-19 sampai ke-20, terlihat perkembangan kehidupan keagamaan pada masyarakat Brunei yang sangat signifikan, baik pada tingkat kelembagaan maupun penerapan ide-ide reformis. Perubahan administrasi ketatanegaraan pada abad ini juga besar andilnya terhadap proses skripturalisasi dan reformasi keagamaan. Karena sultan (raja) memiliki wewenang penuh dalam bidang agama, sehingga hubungan antara sultan dan agama menjadi sangat kuat.¹⁰ Dari perubahan politik dan dinamika Keagamaan yang dijalankan pemerintahan Brunei akan berdampak pada reformasi kehidupan religiusitas umat beragama.

Perkembangan islam di Brunei juga dapat dinilai melalui Kuantitas umat Islam itu sendiri di sana. Brunei berpenduduk 227.000 jiwa (tahun 1988) dengan kaum Muslim sebagai mayoritas, Melayu 155.000 jiwa, China pendatang 41.000 jiwa, masyarakat campuran 11.500 jiwa, dan 20.000 dari Eropa dan pekerja dari Asia sekitarnya yang berasal dari Filipina. Pada tahun 1991 penduduk berjumlah 397.000 jiwa; masyarakat Muslim 64%, Budha

⁹ Thohir, *Perkembangan Peradaban Islam*, Hal 264.

¹⁰ Ibid., Hal 265.

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

14%, dan Kristen 10%. Data terakhir, tahun 2004 penduduk Brunei berjumlah 443.653 jiwa, dan tentunya umat Muslim masih tetap menjadi dominan sampai saat sekarang ini.¹¹

Dari segala aktifitas dan progres perkembangan yang dilakukan brunei ini tentu akan berguna untuk mengokohkan posisi sentral islam sebagai komponen penting dalam ideologi dan falsafah serta prinsip bangsa yang mengatur Jalan legitimasi Politik dan Agama Brunei beserta kehidupan religiusitas masyarakatnya sehari-hari.

Sistem Sosial dan Politik Brunei Darusslam

1. Sistem Sosial

Demografi Brunei didominasi oleh penduduk Melayu asli yang mayoritas beragama Islam. Kemudian dalam aspek kebudayaan, Brunei merupakan salah satu negara yang dikenal dengan budaya Islamnya yang kental. Hal tersebut salah satunya karena dipengaruhi oleh aspek latar belakang sejarah Brunei yang dalam waktu sangat lama berada dalam kekuasaan seorang sultan yang beragama Islam hingga sekarang. Secara otomatis hal tersebut membentuk kepribadian Brunei sebagai negara yang menjalankan syariat Islam pada umumnya, dan juga bisa dijadikan tolak ukur dasar seberapa besar pengaruh syariat Islam dalam membentuk sistem sosial di Brunei Darussalam.

¹¹ Ibid., Hal 416.

Islam juga telah mempengaruhi kebiasaan sosial perilaku konservatif dan pakaian sederhana. Mengikuti pedoman kesopanan, wanita diharapkan akan sepenuhnya ditutupi hanya dengan tangan dan wajah mereka yang terbuka di depan umum. Kebiasaan sosial lain yang menarik adalah bahwa makan dan minum sambil berjalan dianggap tidak sopan dan merupakan perilaku yang harus dihindari. Ketika berjabat tangan dengan seseorang dari lawan jenis, pria harus menunggu wanita untuk menawarkan tangannya karena tidak biasa bagi pria dan wanita untuk menyentuh. Selain itu, menyentuh siapa pun di kepala dianggap kasar. Buddhisme adalah agama kedua yang paling banyak dipraktikkan di sini dengan 13% dari populasi mengidentifikasi sebagai Buddhis. Kekristenan dipraktikkan oleh sekitar 10% dari populasi, menjadikannya agama ketiga yang paling banyak dipraktikkan di Brunei.¹²

Dalam proses menciptakan sistem sosial di Brunei Darussalam salah satunya dengan mendirikan lembaga-lembaga modern yang sesuai dengan tuntunan Islam yang terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya bidang pendidikan, budaya, ekonomi dan hukum. Dalam bidang pendidikan, penggunaan Bahasa Melayu dan Inggris ini diimbangi dengan pengajaran MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu), seperti ajaran agama Islam yang

¹² Amber Pariona. 2018. *Budaya Brunei*. [online]. Diakses dari [Budaya Brunei - WorldAtlas](#). [diakses pada 9 Desember 2021].

Otokrasi Brunei Darussalam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

merupakan program pengajaran mpral inti di sekolah. Pelajaran satu tahun dalam bidang MIB bahkan diwajibkan untuk tingkatan mahasiswa. Sekolah-sekolah sekunder bahasa Arab juga diajarkan pada tahun 1970, dan bagi siswa yang memenuhi syarat kemudian dikirim ke Al-Azhar University di Kairo dengan biaya penuh ditanggung oleh pihak pemerintah Brunei.

Pemerintah juga mendirikan sejumlah pusat kajian Islam untuk kepentingan penelitian agama Islam. Salah satunya pada tanggal 16 September 1985 didirikan pusat dakwah yang bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada para pegawai dibidang agama, masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Kemudian yang terbaru yaitu pendirian Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang sebenarnya memang telah diumumkan sejak tahun 1992, namun baru dibangun pada tahun 1977 dan diresmikan pada tahun 2000. Lembaga ini terletak di wilayah bagian Tutong dan bertujuan untuk melahirkan para huffaz khusus negara.¹³

Selain itu ada madrasah yang tidak berada dalam tanggung jawab kementerian pendidikan, melainkan langsung didirikan dan dibina oleh pihak kerajaan secara penuh dengan ciri khas Islami, misalnya, sekolah yang bernaungan dibawah Yayasan Haji Sultan Hassanal Bolkiah (YHSHB) sistem pendidikannya memperlihatkan ciri

¹³ Admin lembaga. 2016. *Introduction Institut Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah*. [online]. Diakses dari <http://www.itqshhb.edu.bn/>. [diakses pada 12 Juni 2016].

keislaman yang sangat kental. Pelajaran Al-Quran lebih diutamakan sehingga para siswa bisa membaca Al-Quran dengan mengagumkan, namun tidak mengabaikan bidang umum akademik sebagaimana sekolah pada umumnya.¹⁴

Pada masa pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah saat ini, Brunei Darussalam berada di puncak kejayaan dalam beberapa hal jika dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Salah satunya pada aspek sosial ekonominya. Satuan mata uang Brunei Darussalam adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Jumlah produksi minyak mentah dan gas alam hampir setengah Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih dari 90% pendapatan negara. PDB per kapita berada jauh di atas sebagian besar negara yang merdeka setelah perang dunia kedua atau biasa disebut sebagai negara dunia ketiga, sehingga masyarakat Brunei tidak perlu mengkhawatirkan masalah kesejahteraan.

Pemerintah menyediakan semua pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sampai tingkat universitas, penataan pemukiman penduduk hingga terkesan rapi, penyediaan pasokan air, perbaikan metode pertanian dan perikanan, penambahan akses jalan, pembangunan jembatan dan stasiun listrik serta instalasi sistem penyiaran dan telepon. Sekitar lebih dari 59,78% anggaran tahunan

¹⁴ Raghadah Agus. "Kenali Pendidikan Agama dan Arab di Brunei Darussalam". The Brunei Times. 11 Oktober 2014. Hlm 4.

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

pemerintah dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan, sedangkan pendidikan menghabiskan sekitar 21,77%.¹⁵

2. Sistem Politik

Berdasarkan perjanjian November 1971 antara Brunei dan Inggris, Brunei memperoleh otonomi internal yang penuh dan tidak lagi menjadi negara yang terdindungi Inggris. Namun untuk mempertahankan citra sebagai negara yang bertanggung jawab dalam hal hubungan luar negerinya yang selama ini di kontrol Inggris, akhirnya kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan pada tahun 1979 serra mengakhiri perjanjian 1971. Mereka juga berkomitem untuk mewujudkan kemerdekaan politik Brunei dari Inggris pada 1 Januari 1983 secara internasional.¹⁶

Monarki merupakan jenis negara yang dipimpin oleh seorang penguasa kerajaan. Sistem Monarki adalah bentuk Negara tertua di dunia. Monarki di Brunei bersifat paternalistik dan personal. Sultan digambarkan sebagai simbol bangsa dan fokus kesetiaan rakyat. Dia menyampaikan minat dalam urusan publik, melakukan kunjungan ke kabupaten yang jauh untuk memantau kemajuan proyek pembangunan. Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan

¹⁵ Trading economics. 2016. *Brunei- Anggaran pendapatan dan belanja negara*. [online]. Diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget>. [diakses pada 9 Desember 2021].

¹⁶ *Ibid.*

kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif.

Sultan memiliki kekuasaan mutlak, tapi pada saat yang sama ia memahami pentingnya pengembangan institusi profesional milik pemerintah yang akan membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan untuk memerintah dalam sistem politik negara modern. Dalam konteks kebudayaan Melayu, rakyat telah menyerahkan haknya secara bulat kepada raja untuk memerintah. Tentunya raja harus dapat menjalankan amanat tersebut yang tidak hanya diberikan oleh rakyatnya tetapi juga dari Allah SWT untuk membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kemakuran.

Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki 6 kedudukan: Raja sebagai payung Allah di muka bumi, Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam, Raja sebagai kepala negara, Raja adalah kepala pemerintahan, Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat, Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata¹⁷ Dalam Prospeknya Brunei merupakan sebagai negara neo-tradisional, Brunei telah menunjukkan dirinya mampu mengakomodasi kebutuhan modern penduduknya dan memberikan keamanan dan stabilitas. Namun, pada abad ke-21, ketika Brunei matang sebagai

¹⁷ Muchamad Safa'at, "Militer Dalam Prespektif Hukum Tata Negara". Ub Lecture, 2007, hlm.25

Otokrasi Brunei Darussalam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

negara-bangsa, tekanan dan ketegangan mengelola negara modern menjadi jelas.

Sultan sadar bahwa kapasitas negara untuk memberikan layanan sosial dan barang-barang publik terus-menerus berada di bawah tekanan sebagai akibat dari meningkatnya biaya. Brunei terus mengandalkan minyak dan gas untuk pendapatan dan upaya diversifikasi ekonomi belum menghasilkan hasil yang diinginkan. Tantangan bagi monarki Brunei saat ini adalah untuk memastikan bahwa negara selalu mampu mencocokkan permintaan domestik untuk barang-barang publik dan standar hidup yang tinggi. Dengan tidak adanya partisipasi, Sultan harus bekerja keras untuk menarik lebih luas ke konstituen perkotaan dan pedesaan dan terus mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan diri mereka sebagai penguasa yang baik hati.¹⁸

Untuk meringankan masalah dilema raja agar tidak terkesan memonopoli kekuasaan, sang sultan memperkerjakan golongan elit baru berpendidikan tinggi didalam pemerintahan yang ia bentuk dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpuasaan di antara beragam kelompok sosial yang baru muncul dan mengangkatnya menjadi pejabat pemerintahan dengan kedudukan yang telah ditentukan oleh Sultan. Mnejalin kerjasama dengan para elit-elit baru ini, sang siultan

¹⁸ Naimah S.Thalib. 2013. *Brunei Darussalam : Absolutisme Kerajaan dan Negara Modern*. Departemen Ilmu Politik, University Canterbury. [online]. Diakses [Brunei Darussalam: Absolutisme Kerajaan dan Negara Modern - Kyoto Review of Southeast Asia/](#) [diakses pada 9 Desember 2021].

juga berhasil mengurangi ketergantungan pada keliarha kerajaan dan golongan elit tradisional. Para teknorat dan golongan elut berpendidikan tinggi diberikan posisi yang penting di dalam pemerintahan yang dibentuk oleh sang sultan.

Praktik Keagamaan di Brunei Darussalam

Sejarah awal masuknya Islam di Brunei ditemukan beragam versi dan pendapat, Azyumardi Azra menulis bahwa sejak tahun 977 Kerajaan Borneo (Brunei) telah mengutus pedagang Muslim Ali ke Istana Cina. Pada tahun yang sama, diutus lagi tiga duta ke Istana Sung, salah seorang di antaranya bernama Abu 'Abdullah.¹⁹ Tapi tidak ditemukan data lebih lanjut mengenai asal usul utusan tersebut, apakah dia orang pribumi Melayu asli sekaligus pendakwah Islam, atau pedagang Muslim dari luar. Sumber lain menjelaskan bahwa sekitar abad ke-7 pedagang Arab dan sekaligus sebagai pendakwah penyebar Islam telah datang ke Brunei. Dalam Ensiklopedi Oxford yang ditulis dan diedit John L. Esposito, dinyatakan bahwa orang Melayu Brunei menerima Islam pada abad ke-14 atau ke-15 setelah pemimpin mereka diangkat menjadi Sultan Johor.²⁰

Islam di kawasan Brunei Darussalam semakin berkembang menjadi agama resmi negara ketika Muhammad Shah memeluk Islam dan memerintah di

¹⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 29-30.

²⁰ John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol.III (New York: Oxford University, 1995), h. 299.

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

Kerajaan Brunei Darussalam (1406-1408). Islam semakin berkembang terutama semenjak Malaka sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam, jatuh ke tangan Portugal (1511) yang menyebabkan banyak ahli dalam bidang agama pindah ke Brunei Darussalam dan perkembangan Islam semakin nyata lagi semenjak masa pemerintahan Sultan Bolkiyah (sultan ke-5) yang wilayah kekuasaannya meliputi Suluk, Selandung, Borneo, kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani dan utara Pulau Palawan sampai ke Manila.²¹

Brunei memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 31 Desember 1983 dan setelah merdeka Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja (MIB). Yang dimaksud dengan MIB adalah bahwa negara ditopang oleh 3 hal dasar yaitu budaya Melayu, syariat Islam, dan sistem kerajaan.²² Dan MIB dijadikan sebagai ideologi negara Brunei yang terdiri dari 2 dasar, yaitu *Guiding Principle* dan *Form of Fortification*. Dua dasar ini kemudian menjadi benteng penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan (pengekalan) tiga konsep, yaitu mengekalkan negara Melayu; mengekalkan negara islam (hukum Islam yang bermazhab Syafii – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah dari sisi akidahnya); dan mengekalkan negara beraja.²³ Kedudukan agama islam di Brunei sangat jelas dalam

²¹ Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015

²² Marie Sybille de Vienne, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century*, trans. By Emilia Lanier, (Singapore: NUS Press in association with IRASEC, 2015), h. 261.

²³ Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)*, Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015

pelembagaan negara, tetapi UU Islam sebagai UUD masih sangat terbatas penjabarannya.

Sebagai sebuah negara yang menerapkan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), kerajaan Negara Brunei Darussalam amat menitik beratkan ajaran-ajaran Islam sebagai pegangan bagi setiap masyarakat khususnya bagi mereka yang menganut agama Islam.²⁴ Sharon Siddique dalam tulisannya mengutip sebuah pernyataan bahwa Kerajaan Islam Melayu menyuruh kepada masyarakat untuk loyal kepada rajanya, melaksanakan Islam dan menjadikannya sebagai jalan hidup serta menjalani kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati Brunei Darussalam, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pertamanya.²⁵ Tak hanya itu, agama Islam menjadi program moral inti beberapa sekolah di Brunei, dan tanpa mengabaikan pelajaran yang lain, seperti bahasa Inggris dan diimbangi dengan pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa percakapan asli mereka.

Sultan negara menyatakan bahwa Brunei harus melakukan yang terbaik untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda agar mereka tidak terkena *virus of destruction*. Virus ini akan mencemari kepercayaan agama, pendidikan, dan budaya. Gangguan-gangguan akan datang dalam

²⁴ HAJI MAIMUN AQSHA LUBIS ROSLAN HJ ASPAR, *Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam*, Jurnal Pendidikan 30, hal. 142, 2005

²⁵ Sharon Siddique, "Brunei Darussalam: Sebuah Bangsa Religius yang Potensial" dalam Moeflich Hasbullah (ed.), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Cet. II (Bandung: Fokusmedia, 2005), 246

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

bentuk yang tidak diinginkan, seperti pemikiran atau ideologi yang bertentangan dengan cara hidup masyarakat Brunei. Untuk itu kerajaan mengambil langkah-langkah yang dapat menghadang gangguan-gangguan tersebut dan meluruskannya dengan falsafah Melayu Islam Beraja.²⁶ Karena warga Brunei harus tetap menjadikan falsafah Melayu Islam Beraja sebagai dasar menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat.

Dalam konstitusinya, Brunei menetapkan Islam sebagai agama resmi negara dan konsep Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah sebagai pegangan resmi masyarakat Islam di negara Brunei. Pada tanggal 1 Januari 1984 (27 Rabiul Awwal 1440 H), kedudukan Islam di negara Brunei diperkuat lagi oleh Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah dengan menyampikan titah yang berbunyi: "*Negara Brunei Darussalam dengan izin serta limpah kurnia Allah subhanahu wataala, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang Merdeka, Berdaulat dan Demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran Ugamma Islam menurut Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan, dan dengan petunjuk serta keredaan Allah subhanahu wataala.*"³ (Negara Brunei Darussalam dengan izin serta limpahan karunia Allah swt, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat, dan demokratis bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah Wal Jama'ah

²⁶ Ibid 183

Durrotul Dea Mahmuda
Rusli Baharuddin
Syafiatul Umma

dan dengan berdasarkan keadilan, amanah, kebebasan, dan dengan petunjuk serta keridaan Allah swt.”)²⁷

Setelah titah tersebut disampaikan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, kedudukan Islam bertambah mantap dan amalan beragama di Negara Brunei Darussalam pun dapat dilangsungkan dalam corak yang moderat menurut aliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah dari segi akidah dan Mazhab Syafi'i dari segi fikih. Menurut Norarfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, setelah diumumkannya titah Sultan Brunei tersebut, bukan hanya agama Islam saja yang dinyatakan sebagai agama resmi, tetapi Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah pun ikut pula dinyatakan sebagai pegangan resmi masyarakat Islam di negara Brunei.²⁸

Ini berarti bahwa segala macam bentuk ajaran atau faham yang bertentangan dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jama'ah, seperti Salafi-Wahabi, Syi'ah, Qadiani, Baha'i, pemikiran liberal, dan lain-lain, tidak boleh dibawa masuk dan disebar di Brunei. Paling kurang, ada lima macam metode yang dapat digunakan dalam upaya memantapkan pemahaman, penghayatan, dan

²⁷ Himpunan Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Di Majlis-Majlis Keagamaan Dan Titah-Titah Yang Berunsur Keagamaan (1967-1996), h. 205.

²⁸ Norarfan bin Haji Zainal, *Kekuatan Ahli Sunnah Wal Jama'ah Di Bawah Naungan Pemerintahan Cemerlang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam (1967-2018)*, Makalah Seminar Kefahaman Aqidah dan Pemikiran Semasa, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Brunei Darussalam, 25-26 April 2018, h. 2

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

pengamalan konsep Islam moderat versi Ahli Sunah Waljamaah Mazhab Syafi'i di negara Brunei, yaitu: ²⁹

1. Penyusunan Undang-Undang Islam sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi warga masyarakat Brunei. Contoh untuk bidang ini ialah disusunnya Perlembagaan Negara atau konstitusi negara Brunei, yang di dalamnya, sebagaimana disinggung sebelum ini, agama Islam menurut versi Ahli Sunah Waljamaah Mazhab Syafi'i, ditetapkan sebagai agama resmi negara Brunei. Namun begitu, agama-agama lain tetap boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh para pemeluknya. Hal ini, sebagaimana disinggung di muka, diatur dalam Bab 3 Pasal 1 Perlembagaan Negeri Brunei 1959.

2. Pembangunan berbagai institusi keagamaan yang bertujuan untuk mengukuhkan dan memelihara eksistensi ajaran Islam moderat versi Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, seperti Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB), dan Jabatan Mufti Kerajaan (JMK).

3. Pendirian pusat kajian dan penelitian sebagai pusat rujukan, kajian, dan penelitian tentang Islam moderat Ahlu Sunnah wal Jama'ah menurut vesri mazhab Syafi'i.

²⁹ Skripsi, Mular Ibnu Syarif, Arip Purkon, *Moderasi Beragama dalam Bernegara di Asia Tenggara (Studi Komparatif di Indonesia, Singapura dan Brunei)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
Humanistika: Vol.8 No.1 2022

4. Memasukan ajaran Islam moderat versi Ahlu Sunnah waljama'ah dalam Kurikulum pendidikan nasional Brunei di semua level, sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

5. Penerbitan buku, brosur, dan lain-lain, yang berisi materi seputar ajaran Islam moderat versi Ahlu Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai materi muatan kurikulum wajib yang kemudian ditetapkan sebagai rujukan dan teks bacaan wajib di berbagai institusi pendidikan, baik formal maupun non-formal, seperti di Pengajian Balai (Pondok Pesantren), Sekolah Rendah Agama atau Madrasah Ibtida'iyah, Institusi Pengajian Tinggi Islam atau Perguruan Tinggi Keagamaan, maupun di berbagai institusi pendidikan non-formal yang disediakan untuk masyarakat umum. Penyelenggaraan program-program ilmiah seperti forum diskusi dan seminar, baik seminar nasional maupun internasional. Terutama di negara-negara tempat tujuan studi para pelajar atau mahasiswa asal Brunei, seperti di United Kingdom, Jordania, Mesir, dan Malaysia.

Brunei Darussalam menjadikan Islam sebagai ideologi negara (Najtama, 2018) dengan konsep Melayu Islam Beraja, dan telah dianggap sebagai brand of peaceful dan moderat (Hayat, 2012). Karenanya secara empiris tidak tampak kemunculan radikalisme di negara tersebut. Selain itu sebagai tindakan preventif untuk menanggulangi radikalisme, kesultanan Brunei telah melakukan berbagai cara seperti membuat undang-undang dan aturan yang ketat terkait Islam yang diajarkan di Brunei, bahan-bahan bacaan

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

masyarakat juga diseleksi oleh pihak kerajaan, semua buku dan bahan bacaan masyarakat harus mendapat ijin dari negara melalui Pusat Dakwah, para penceramah, pengajar dari luar negara harus mendapat izin Majelis Ugama Brunei (semacam MUI), dan jika ada isu yang datang dari luar negeri segera diselesaikan.³⁰

Untuk menunjukkan identitas ideologi Negara Brunei, sultan dalam beberapa kesempatan mengeluarkan dekrit yang isinya: Membuat garis pemisah antara Islam pribumi dan Islam luar, terutama kaum fundamentalis, termasuk gerakan al-Arqam dari Malaysia; Sultan mengharuskan warga Melayu mampu membaca al-Qur'an dengan mengeluarkan dana 2 juta dolar Brunei untuk merealisasikan kebijakan ini; Memerintahkan pentingnya pengajaran bahasa Melayu dalam aksara Jawi (Arab-Melayu), agar masyarakat memahami hubungan antara bahasa Melayu dengan warisan budaya Islamnya; Pemerintah juga melarang jual beli minuman keras di toko-toko atau hotel.

Prospek Islam di Brunei masa-masa mendatang akan semakin maju dan berkembang terus. Prospek posisi sentral Islam lagi-lagi diperkuat dengan kemajuan Brunei dalam segala sektor, terutama sektor peminyakan dan industri yang tentu saja memiliki sumbangsih besar terhadap kejayaan Islam itu sendiri. Negara ini menjadi kaya dengan sektor tersebut, dan akan menjadikan masyarakatnya semakin meningkat pula, terutama peningkatan

³⁰ Tri Astutik Haryati, dkk, *Dakwah Struktural Sebagai Pengarusutamaan Moderasi Islam di Indonesia & Brunei Darussalam*, IAIN Pekalongan Press, Agustus 2020, hal. 6

dari segi pengalaman keagamaan. Kemakmuran dan kesejahteraan dalam bidang agama yang dinikmati masyarakat Muslim Brunei dewasa ini, memang sangat beralasan. Sebab, semua aktivitas kerajaan dan aturan pemerintah berfungsi untuk memperkokoh eksistensi Islam. Pemerintah melarang jual beli minuman keras, pelarangan sekte-sekte Islam keras seperti al-Arqam dan selainnya sebagai indikator bahwa Brunei tetap menjadi Darus Salam, sebuah negara aman yang sejahtera, terhindar dari berbagai ancaman, gangguan, dan kekacauan baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negerinya.³¹

Analisis Otokrasi Brunei Darussalam; Aktualisasi Religiusitas Islam Melalui Legitimasi Politik

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas mulai dari sejarah berdirinya negara Brunei sebelum menjadi kesultanan hingga terbentuknya monarki sultan disana, faktor sosial dan politik disana akan sangat mempengaruhi kedepannya Brune bisa terbentuk sebagai negara Neo Tradisional. Yang dimana nilai ajaran Iislam khas dipadukan dengan budaya melayu yang sederhana dan konservatif menciptakan tatanan sosial masyarakat yang taat dan Religius. Dan Religius sosial ini diperkuat dengan adanya legitimasi politik sultan Brunei lewat kekuasaan politiknya mutlaknya untuk ditaati dimana hal ini tercermin pada penerapan dan pengajaran falsafah negara

³¹ Fikria Najtama, *Perkembangan Islam di Brune*, *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM Volume 10, Nomor 2, September 2018*, hal. 420

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

Brunei yaitu MIB (Melayu Islam Beraja) sebagai kerangka sistem sosial dan politik yang dibuat Sultan Hasanah Bolkiyah.

Dari kerangka yang sistem sosial politik yang dibuat Sultan melalui falsafah MIB ini, selanjutnya akan tentu berpengaruh pada praktik religiusitas islam disana yang dapat kita ketahui dari upaya kebijakan dan dekrit Sultan dalam memfasilitasi dan mengakomodasi penerapan ajaran islam Ahlusunnah Wal'Jamaah. Seperti melalui pembentukan dan pemberlakuan undang-undang islam sebagai pedoman hidup masyarakat Brunei, pembangunan berbagai institusi keagamaan yang bertujuan untuk mengukuhkan dan memelihara eksistensi ajaran Islam moderat versi Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, membentuk kajian dan penelitian islam sebagai pusat rujukan, kajian, dan penelitian tentang islam moderat Ahlu Sunnah wal Jama'ah, versi mahdzab Imam Syafi'i, dan lain sebagainya.

Jika kita melihat serta menganalisis dari penjelasan dan gambaran Brunei diatas secara holistik dapat diketahui bahwasanya ajaran islam dan hukum Islam disana menjadi kunci utama dalam memahami sosial, politik, budaya dan religiusitas masyarakat disana yang kemudian kelak akan membentuk model sistem politik dan model kekuasaan politik yang berpegang teguh pada ajaran dan hukum Islam Brunei yang ber madzhab Syafi'i, Ahlusunnah Wal'Jamaah.

Model sistem politik yang berjalan disana merupakan monarki sbсолют dimana kekuasaan dan keputusan pemimpin atau sultan menjadi kepala negara, kepala pemerintahan dan pemimpin tertinggi bidang srgama namun

Brunei juga memiliki dewan perwakilan dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang, yang hanya bertugas sebagai konsultan. Sehingga secara otoritatif kekuasaan politik dan kekuasaan eksekutif dikuasai penuh oleh Sultan. Tetapi dalam titah Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Pada tanggal 1 Januari 1984 (27 Rabiul Awwal 1440 H), yang berbunyi: “ *Negara Brunei Darussalam dengan izin serta limpah kurnia Allah subhanahu wataala, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang Merdeka, Berdaulat dan Demokratik bersendikan kepada ajaran-ajaran Ugama Islam menurut Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan, dan dengan petunjuk serta keredaan Allah subhanahu wataala.*

Kata demokratis dan nilai kebebasan menjadi hilang relevansinya, dikarenakan cara kerja dari sistem politik brunei yang menempatkan otoritas dan kekuasaan politik di Brunei tersentralisasi pada keputusan Sultan. Hal ini diperkuat dengan karakteristik negara Brunei yang lebih mengarah pada nasionalisme kokoh yang tersentralisasi pada kekuasaan sultan ketimbang Demokrasi yang terdesentralisasi. Sentralisasi politik brunei tentu bergantung pada kemampuan dan kondisi sosial, politik disana. Adapun beberapa faktor yakni sebagai berikut :

- a. Faktor sifat dan bentuk negara: Brunei sebagai suatu negara lebih mengedepankan nilai nasionalisme islam melayu disana untuk menjaga persatuan dan kesatuan sosial disana.

Otokrasi Brunei Darusslam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

- b. Faktor rezim dan kuasa: Rezim di Brunei bekerja dengan model otoriter dimana hal ini mendorong pada gaya politik yang berorientasi pada nasionalisme.
- c. Faktor Geografis: Secara geografis Brunei dengan luas yang cukup kecil terhimpit oleh negara tetangga yang lebih besar, ini mendorong berjalannya sistem politik yang mengharuskan pengaturan penuh dengan nasionalisme secara sentralistik.
- d. Faktor warga negara: Dengan komposisi masyarakat sosial disana yang didominasi oleh etnis Melayu Islam ini menjadikan Brunei sebagai negara yang cukup homogen secara sosial sehingga pemahaman nasionalisme lebih mudah dilakukan secara konsisten.
- e. Faktor Sejarah: Brunei dengan Malaysia memiliki pengalaman dalam melakukan pemberontakan dan perlawanan pada pihak penjajah yaitu Inggris dan negara Eropa yang hendak menjajah. Yang dimana hal ini kelak akan membentuk semangat nasionalis pada kedua negara meskipun pada akhirnya berpisah.
- f. Faktor Efisiensi dan Efektifitas: Pemerintahan Brunei telah bekerja mencapai efektivitasnya dengan cara sentralisasi dan nasionalisme, untuk keperluan pembangunan hukum Islam dan untuk keperluan lain seperti politik dan ekonomi.

- g. Faktor Politik: Kebijakan politik brunei atau adanya alasan ekonomi ini bertujuan untuk melakukan pembangunan dan membentuk kekuatan militer dilaksanakan nasionalisme.³²

Dalam konsep utama yang dianjurkan Al Quran terhadap ilmu pemerintahan yaitu konsep keseimbangan, konsep pertanggungjawaban dan konsep kepemimpinan. Melihat pada aspek konsep keseimbangan, Pemerintahan Brunei masih didominasi Sentralisasi. Adapun petunjuk yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Quran mengenai desentralisasi maupun sentralisasi sangatlah jelas, Allah berfirman bahwa sebenarnya pemisahan daerah (desentralisasi) yang berlebihan tidak akan disenangi-Nya begitupun dengan pemusatan kekuasaan (sentralisasi) yang berlebihan karena akan menimbulkan keangkuhan, kesombongan dan kesemena-menaan. Karena sebenarnya pertanggungjawaban itulah yang kelak dituntut.³³ Maka dari itu konsep pertengahan merupakan jawaban yang ideal atas pelaksanaan pemerintahan.

Pada konsep keseimbangan, pemerintahan Brunei hanya terbentuk hubungan yang vertikal. Dimana pemerintah memberikan komandonya secara satu arah tanpa adanya kompromi dan rakyat dengan semerta-merta menurut. Tetapi hal ini sebenarnya tidak benar karena rakyat memiliki kemampuan dan hak untuk menolak perintah penguasa yang zalim, hal ini merupakan bentuk jihad besar. Pada konsep keseimbangan pemerintahan

³² Inu Kencana Syafie, 2019, *Ilmu Pemerintahan & Al Quran*, Jakarta, Bumi Aksara. Hal 144.

³³ Ibid. Hal 146.

Otokrasi Brunei Darussalam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

otokrasi ini dalam catatan histori manusia terjadi beberapa ketiraniaan di dunia yang seakan titah raja adalah undang-undang dan negara itu adalah raja itu sendiri dan terkadang menimbulkan diskriminasi dan perampasan hak sipil.

Pada Brunei konsep otokrasi ini pada kenyataannya memang terjadi dimana kekuasaan dan banyak keputusan pemimpin merupakan bentuk hukum dan kewajiban yang diharuskan patuh. Meskipun otokrasi terus berjalan, indikasi tirani belum terlihat dan terasa pada saat ini. Namun jika melihat efek samping dari konsep otokrasi brunei ini tentu berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan, dimana implikasi sangat terasa pada partisipasi masyarakat pada hal politis menjadi sangat terbatas khususnya pada urusan perolehan kekuasaan politik, serta diskriminasi atas hak dan politik Perempuan disana yang dimana sangat kecil dapat masuk kedalam jabatan pemerintahan di brunei.

Adapun konsep kepemimpinan pada pemerintahan Brunei yaitu Sultan dalam mengelola pemerintahan secara baik hendaknya pemimpin memerhatikan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan. Untuk hal ini jika melihat dari pencapaian negara Brunei dan segala hal yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi disana dibuktikan dengan dimanjakannya masyarakat brunei oleh fasilitas dan sarana yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

KESIMPULAN

Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara. Ajaran islam dan hukum Islam di Brunei menjadi kunci utama

Durrotul Dea Mahmuda
Rusli Baharuddin
Syafiatul Umma

dalam memahami sosial, politik, budaya dan religiusitas masyarakat disana yang kemudian kelak akan membentuk model sistem politik dan model kekuasaan politik yang berpegang teguh pada ajaran dan hukum Islam Brunei yang ber madzhab Syafi'i, Ahlusunnah Wal'Jamaah. Jika dianalisis Brunei menerapkan konsep utama yang dianjurkan Al Quran terhadap ilmu pemerintahan yaitu konsep keseimbangan, konsep pertanggungjawaban dan konsep kepemimpinan. Melihat pada aspek konsep keseimbangan, Pemerintahan Brunei masih dominasi Sentralisasi. Pada konsep keseimbangan, pemerintahan Brunei hanya terbentuk hubungan yang vertikal. Dimana pemerintah memberikan komandonya secara satu arah tanpa adanya kompromi dan rakyat dengan semerta-merta menurut. Adapun konsep kepemimpinan pada pemerintahan Brunei yaitu Sultan dalam mengelola pemerintahan secara baik hendaknya pemimpin memerhatikan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Müller, D. M. (2016). Brunei in 2015: oil revenues down, sharia on the rise. *Asian Survey*, 56(1)

Lihat, "Brunei Darussalam," http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam.

Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015.

Elisseeff, Vadime (January 2000). "*Chapter 8: A Brunei Sultan of the Early Fourteenth Century – A Study of an Arabic Gravestone*". *The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce*. Berghahn Books.

Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015

Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015.

Amber Pariona. 2018. *Budaya Brunei*. [online]. Diakses dari [Budaya Brunei - WorldAtlas](#). [diakses pada 9 Desember 2021].

Admin lembaga. 2016. *Introduction Institut Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiab*. [online]. Diakses dari <http://www.itqshhb.edu.bn/>.

Raghadah Agus. "*Kenali Pendidikan Agama dan Arab di Brunei Darussalam*". *The Brunei Times*. 11 Oktober 2014.

Tranding economics. 2016. *Brunei- Anggaran pendapatan dan belanja negara*. [online]. Diakses dari

Durrotul Dea Mahmuda
Rusli Baharuddin
Syafiatul Umma

<http://id.tradingeconomics.com/brunei/government-budget>.

[diakses pada 25 Agustus 2016].

Muchamad Safa'at, "Militer Dalam Prespektif Hukum Tata Negara". Ub
Lecture, 2007

Naimah S.Thalib. 2013. *Brunei Darussalam : Absolutisme Kerajaan dan Negara
Modern*. Departemen Ilmu Politik, University Canterbury. [online].
Diakses [Brunei Darussalam: Absolutisme Kerajaan dan Negara
Modern - Kyoto Review of Southeast Asia/](#) [diakses pada 9
Desember 2021].

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII dan XVIII*,(Jakarta: Kencana, 2005

John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*,
Vol.III (New York: Oxford University, 1995

Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam*, TOLERANSI: Media
Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015

Marie Sybille de Vienne, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century*,
trans. By Emilia Lanier, (Singapore: NUS Press in association with
IRASEC, 2015

Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-
Historis)*, Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama,
Vol.7, No.1 Januari-Juni 2015

Otokrasi Brunei Darussalam:

Aktualisasi religiusitas islam melalui legitimasi politik masa kini

- HAJI MAIMUN AQSHA LUBIS ROSLAN HJ ASPAR, *Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam*, Jurnal Pendidikan 30, 2005
- Sharon Siddique, "Brunei Darussalam: Sebuah Bangsa Religius yang Potensial" dalam Moeflich Hasbullah (ed.), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*, Cet. II (Bandung: Fokusmedia, 2005
- Himpunan Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Di Majlis-Majlis Keagamaan Dan Titah-Titah Yang Berunsur Keagamaan (1967-1996)
- Norarfan bin Haji Zainal, *Kekuatan Ahli Sunnah Wal Jama'ah Di Bawah Naungan Pemerintahan Cemerlang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (1967-2018)*, Makalah Seminar Kefahaman Aqidah dan Pemikiran Semasa, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Brunei Darussalam, 25-26 April 2018
- Skripsi, Mujar Ibnu Syarif, Arip Purkon, *Moderasi Beragama dalam Bernegara di Asia Tenggara (Studi Komparatif di Indonesia, Singapura dan Brunei)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Tri Astutik Haryati, dkk, *Dakwah Struktural Sebagai Pengarusutamaan Moderasi Islam di Indonesia & Brunei Darussalam*, IAIN Pekalongan Press, Agustus 2020
- Fikria Najtama, *Perkembangan Islam di Brunei*, TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM Volume 10, Nomor 2, September 2018

Durrotul Dea Mahmuda
Rusli Baharuddin
Syafiatul Umma

Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan & Al Quran*, Jakarta, Bumi Aksara
Press, 2019